**Kisi-kisi PKS UAS**

1. Makna kebijakan publik, apa yang sebaiknya ditangani pemerintah dan yang diserahkan pihak lain.

Apa landasan falsafah yang melandasinya?

Bagaimana dengan kemitraan antar pemerintah dengan swasta? Kemitraan antar swasta?

Apa kelemahan dan kekurangan jika suatu urusan ditangani pemerintah?

2. Kebijakan bisa bersifat regulatif or deregulatif, restrictive or non restrictive, alokatif dan distributive.

Berikan contohnya pada kebijakan sumberdaya alam seperti air dan barang tambang.

3. Benarkah isue kemiskinan, pemerataan, pertumbuhan, pemerintahan bersih (clean goverment) telah dipertinmbangkan pada kebijakan pemerintah Indonesia?

Jelaskan dari sisipernyataan, aksi, maupun hasil, atau dapat pula dari sisi retorika, perencanaan, akuisisi dan implementasi.

4. Menurut anda apa "triggerung mechanism" atau mekanisme pemicu dalam kebijakan pemerintah mengenai sumberdaya alam khususnya yang terkait dengan sumber energi utama?

Jelaskan cakupan, intensitas, horizon waktu dan sumberdaya.

5. Pada harian Kompas 26 Oktober tertulis "Negara dirugikan 276 triliun rupiah akibat perambahan hutan untuk perkebunan dan pertambangan"

a. Menurut anda, mengapa permasalahan itu terjadi ditinjau dari politik ekonomi sumberdaya alam?

b. Jabarkan permasalah itu berdasarkan sektor seperti sumberdaya air, sumberdaya hutan dan sumberdaya tambang.

Bagaimana solusi mengatasi permasalahan sumberdaya alam tersebut

6. Pada tinjauan politik ekonomi dikenal istilah dilema pembangunan-lingkungan (development environment dilemma)

Jelaskan makna istilah tersebut, termasuk pengaruhnya pada persaingan sumberdaya alam antar kepentingan, serta degradasi dan ketersediaan sumberdaya.

7. Apa saja permasalahan sumberdaya air dan penyebabnya secara umum. Peran pemerintah dalam mengelola sumberdaya air belum tepat.

Jelaskan permasalahan menajemen sumberdaya air saat ini dan bagaimana mengatasi ha itu.

Kebijakan sumberdaya air dapat mengacu pada instrumen mengatasi eksternalitas berupa Comand-control, insentifpasar dan kesukarelaan.

Menurut anda, mana yang efektif dalam memelihara Daerah Aliran Sungai?

8. Monopolictic or Oligopolistic Market Structure in mining industries can lead to loss in social welfare. Bagaimana cara mengatasi hal ini?

Bagaimana UU Otonomi daerah mengatur hal ini?

9. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan ekspor hilirisasi pertambangan yaitu melarang ekspor barang mentah dan mewajibkan perusahaan tambang untuk mengolah produknya.

Berikan komentar mengapa kebijakan ini penting dilakukan?

10. Bencana hidrometeorologi terkait dengan ulah manusia dan kesalahan kebijakan. Salah satunya terkait dengan pengelolaan aliran sungai (DAS).

Jelaskan akibat salah kebijakan terhadap lingkungan dalam suatu sistem DAS!

Sistem kelembagaan pengelolaan DAS bagaimana yang ideal dikaitkan dengan otonomi daerah?